

Aksi Peduli Human Traficking Di Desa Pantae

¹⁾Adeodata Laniria C.B Mbiri, ²⁾Kanisus Kono, ³⁾Adeodata Januario Barros Mbiri

¹⁾Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

²⁾Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Kefamenanu Indonesia

³⁾Ilmu Administrasi Negara, STISIP Fajar Timur, Atambua, Indonesia.

Email Coresponding :lanijanuari00@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Aksi Peduli
Human trafficking
prefentif

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada tindakan nyata peduli *human trafiking* yang merespon permasalahan NTT sebagai propinsi dengan korban *human trafficking* tertinggi kedua di Indonesia. Penyebab *human trafficking* seperti mata rantai yang sulit untuk diputuskan karena didorong oleh melemahnya ekonomi masyarakat NTT menyebabkan ketidakterjangkaunaan pendidikan dengan demikian pola pikir untuk keluar dari paradigma ini maka salah satu jalan yang ditempuh adalah migran akan tetapi kegiatan migran yang dilakukan menyesatkan karena dengan prosedur yang ilegal dengan alasan sangat mudah prosedurnya akan tetapi tanpa disadari hal ini merupakan peluang untuk terjadinya *human trafficking*. Desa Pantae adalah salah satu desa di NTT yang menyumbang tenaga migran dengan jalur illegal. Oleh karena itu maka tim pengabdi melakukan kegiatan pengabdian yang berfokus pada aksi peduli dengan kegiatan preventif dan rehabilitasi.

ABSTRACT

Keywords:

Caring action
Human trafficking
Preventiv

This service activity focuses on real actions to care about human trafficking which responds to the problem of NTT as the province with the second highest number of human trafficking victims in Indonesia. The cause of human trafficking is like a chain that is difficult to break because it is driven by the weakening economy of the people of NTT causing the unaffordability of education. Thus, the mindset to get out of this paradigm is that one of the paths taken is migrants, but the migrant activities carried out are misleading because the procedures are illegal, with The reason is that the procedure is very easy, but without realizing it, this is an opportunity for human trafficking to occur. Pantae Village is one of the villages in NTT that contributes migrant workers through illegal means. Therefore, the service team carries out service activities that focus on caring actions with preventive and rehabilitation activities.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Pada masa peradaban kuno istilah perdagangan manusia dikenal dengan sebutan perbudakan. Sistem perbudakan zaman kuno merupakan campuran dari perbudakan hutang, perbudakan karena hukuman atas kejahatan yang dilakukan, perbudakan tawanan perang, pengabaian anak, serta garis keturunan budak yaitu kelahiran anak-anak budah yang akan menjadi budak (Galbinst, n.d.).

Pada zaman pra Romoawi sistem perbudakan diperdagangkan secara legal seperti layaknya barang, tiap-tiap negara menerapkan hukumnya tentang sistem perbudakan dan melegalkannya (Galbinst, Mikael EskelnerYuri, n.d.), pada akhir abad ke-18 fenomena perbudakan mendapatkan perhatian yang dipandang dari aspek kemanusiaan, pada akhirnya terjadi konflik kelas sosial antar kaum borjuis dan kaum proletar yang kemudian mendongkrak lahirnya “The Universal Declaration Human Rights” yang dikenal dengan istilah HAM (Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948. Setelah runtuhnya komunisme pada tahun 1989 perbatasan internasional antara blok barat dan blok timur menjadi lebih mudah untuk disebrangi fenomena yang terjadi dari perubahan geopolitik ini adalah penyelundupan manusia yang mengeksplorasi mobilitas orang kelas bawah “miskin” untuk mendapatkan pekerjaan (Thompson, 2015).

Pada abad ke-21 sistem perdagangan orang mengalami transformasi yang inovatif yakni menggunakan teknologi dalam jaringan perdagangan orang serta media-media online sebagai media pendukung perdagangan orang (Sarkar, 2015). Dalam penelitian Mark Latonero menunjukkan bahwa difusi teknologi digital yang cepat

seperti ponsel, situs jejaring sosial, dan Internet telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, saluran dan peluang baru untuk eksploitasi juga muncul. Bisnis perdagangan manusia semakin banyak dilakukan secara online dan melalui ponsel serta perdagangan yang difasilitasi teknologi lebih menyebar dan adaptif (Latonero, 2012).

Persoalan tentang buruh migran Indonesia sangat bervariasi dengan berbagai macam topik persoalan. Dalam penelitian Theddy menemukan bahwa banyak pekerja migran Indonesia dengan status illegal yang diperdagangkan oleh agen illegal yang pada akhirnya menghadapi banyak permasalahan serta tidak memperoleh perlindungan hukum sehingga tidak dapat mengklaim haknya (Theddy, Ningrum Natasya, Agusmidah, 2021). Bentuk perdagangan manusia yang paling umum adalah kerja paksa dan eksploitasi seksual, terutama terhadap perempuan, anak-anak dan anak laki-laki. Rute pekerja illegal melintasi perbatasan internasional dengan tidak memiliki dokumen resmi yang menunjukkan legalitas perjalanan, agen illegal melakukan eksploitasi ke bidang industri, konstruksi, perkebunan, pertambangan serta manufaktur (Ariadne et al., 2021).

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023 (Juni)

Berdasarkan Asal Provinsi Pekerja Migran Indonesia

NO	PROVINSI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1	Jawa Timur	4.957	5.905	6.250	4.915	6.013	5.950	32.924
2	Jawa Tengah	4.611	5.150	5.143	4.535	5.048	4.658	26.407
3	Jawa Barat	3.976	4.100	4.456	3.093	4.626	3.725	24.033
4	Nusa Tenggara Barat	5.328	4.994	3.102	1.801	2.074	2.204	20.903
5	Lampung	149	196	199	1.287	1.966	1.109	9.369
6	Bali	628	701	708	814	1.333	953	5.137
7	Sumatera Utara	1.525	931	1.009	431	104.0	748	5.684
8	Banten	244	284	232	190	276	234	1.460
9	Sumatera Selatan	200	196	148	77	205	219	1.045
10	Sulawesi Selatan	56	63	47	59	72	69	496
11	Nusa Tenggara Timur	78	101	113	120	127	51	760
12	Arab Saudi	42	60	77	65	70	12	316
13	Dki Jakarta	88	92	102	78	112	108	540
14	Di Yogyakarta	63	118	144	58	773	114	660
15	Sumatera Barat	198	87	44	48	56	92	525
16	Kepulauan Riau	44	62	40	23	111	74	356
17	Sulawesi Utara	60	37	47	37	38	53	272
18	Riau	31	42	44	15	37	46	215
19	Bengkulu	34	32	44	32	46	43	231
20	Kalimantan Barat	49	137	61	35	87	40	409
21	Kalimantan Timur	11	1	11	7	4	15	71
22	JAMBI	18	28	51	19	21	15	162
23	Sulawesi Tengah	25	18	21	18	20	15	127
24	Sulawesi Tengara	14	14	13	20	17	10	98
25	Sulawesi Barat	4	2	2	9	11	15	43
26	Kalimantan Selatan	4	9	11	7	14	4	59
27	Kalimantan Timur	9	5	5	9	9	6	43
28	Kalimantan Tengah	4	5	4	5	6	5	29
29	Coronado	1	0	1	1	5	4	12
30	Barito Selatan	5	2	2	2	9	4	24
31	Barito Utara	0	2	2	0	0	2	6
32	Makassar	5	5	1	3	3	3	17
33	Makassar Utara	0	3	1	1	0	0	5
34	Papua Barat	0	1	2	0	1	0	4
Jumlah		24.016	24.789	24.271	16.358	25.969	20.388	135.791

*Data ditarik pada 1 Juli 2023

**Data diurutkan berdasarkan jumlah Penempatan pada bulan Juni

Gambar 1. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023

*Sumber BP2MI <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>

PENDIDIKAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
SD	5.647	6.140	5.414	3.454	5.193	4.337	30.188
SMP	7.508	7.803	8.085	5.551	8.494	6.247	43.687
SMA/SMK	10.348	10.291	10.287	6.878	11.468	8.799	58.070
Diploma	279	314	274	294	507	586	2.254
Sarjana	229	236	206	174	306	416	1.567
Pasca Sarjana	5	5	5	7	1	3	26
Jumlah	24.016	24.789	24.271	16.358	25.969	20.388	135.791

Gambar 2. Penempatan Pekerja Migran Berdasarkan Status Pendidikan

*Sumber BP2MI <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terdapat 5,3 juta pekerja Indonesia yang berstatus illegal. Total pekerja migran pada bulan juni 2023 berjumlah 135.791 jiwa dengan

3413

rincian pada bulan januari berjumlah 24.016 jiwa dan didominasi oleh status pendidikan SMA/SMK. Pada bulan februari mengalami peningkatan dengan jumlah 24.789 jiwa dengan berlatar belakang pendidikan 6.140 jiwa dengan status pemdidikan SD, 7.803 jiwa berstatus SMP, 10.291 jiwa berstatus pendidikan SMA/SMK, 314 jiwa Berstatus pendidikan Diploma, 229 berstatus pendidikan Sarjana, 5 orang berstatus pendidikan Pasca Sarjana. Pada bulan Maret jumlah pekerja migran berjumlah 24.271 jiwa, pada April berjumlah 16.358 jiwa, pada bulan Mei berjumlah 25.969 jiwa, pada bulan juni berjumlah 20.388 jiwa, pada bulan juli berjumlah 20.388 jiwa. Setiap bulan selalu adanya pengaduan pekerja migrasi Indonesia dengan total pengaduan pada bulan januari-juni 2023 berjumlah 898 dengan rincian 322 oleh kaum laki-laki dan 576 oleh kaum perempuan. Pengaduan dan media yang digunakan paling banyak adalah media surat, secara langsung serta via telepon.



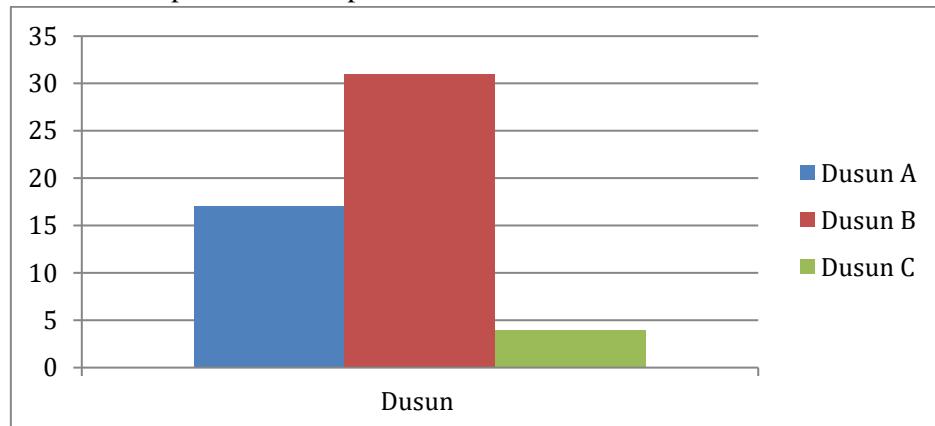
Gambar 3. Pola Relasi Dalam Pelaksanaan Migrasi Illegal

Dalam penelitian Ronald Witzer menegaskan bahwa pengalaman hidup perdagangan manusia dan migrasi sangat bervariasi. Terdapat beberapa pola relasi yang terjalin dalam pelaksanaan migran illegal mulai dari hubungan yang sangat koersif dan eksploratif hingga kerja sama, konsensual, dan hubungan yang saling menguntungkan antara migran dan fasilitator mereka, dengan wilayah abu-abu yang lebih kompleks di antara kedua kutub. Beberapa calo adalah kerabat, teman, atau rekan yang merekrut pekerja dan memfasilitasi migrasi. Pola relasi yang lain terjalin tanpa adanya hubungan yang dapat menimbulkan kepercayaan maka digunakannya pendekatan berupa penipuan, kekerasan atau terlibat dalam pelanggaran yang serius dan sistematis (Weitzer, 2014).

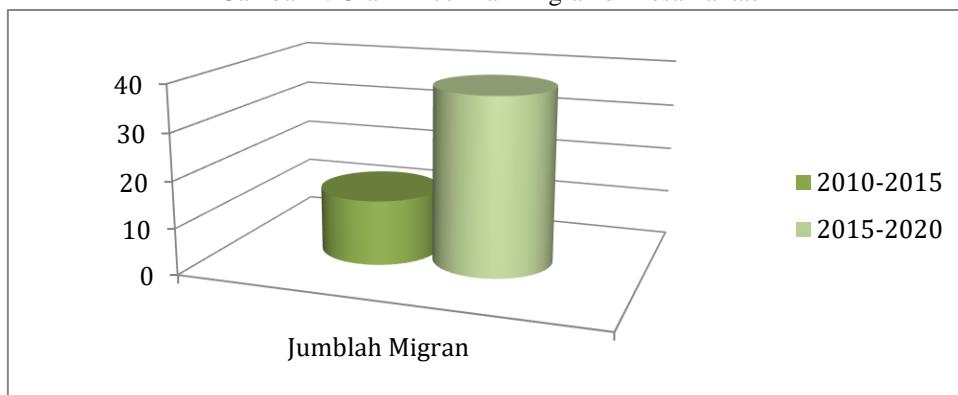
Penelitian Jane Nady Sigman agen illegal menggunakan beberapa pendekatan dalam perdagangan orang yakni penipuan, pemaksaan hingga aksi kekerasan untuk mengeksploitasi profit dari pekerja illegal (Sigman, 2008). Berdasarkan data BP2MI Propinsi NTT terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang meninggal dunia sebanyak 74 orang, pada 2023 terhitung dari Januari hingga Mei, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dalam keadaan tak bernyawa sudah mencapai 11 orang (Rosanty, 2023).

Penelitian Ever Scord menunjukan kasus perdagangan manusia di Propinsi NTT merupakan konsekuensi dari faktor krmiskinan sehingga minimnya tingkat pendidikan yang menjadikan tingkat SDM menjadi minim dengan demikian dapat mudah untuk dipengaruhi, hingga ditipu sehingga propinsi NTT merupakan penyumbang korban TPPO terbanyak (Everd Scord Rider DanielNandang Mulyana, 2017). Kasus *Human Trafficking* sudah menjadi masalah internasional serta kebanyakan yang menjadi korbannya adalah orang-orang yang berasal dari desa dengan faktor ekonomi lemah, minimnya pendidikan.

Dalam rangka memberantas *Human Trafficking* membutuhkan kolaborasi antara banyak elemen baik dari akademisi, pemerintah, LSM, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu upaya untuk membantu memberantas *Human Trafficking* khusnya di NTT kami Dosen dari Universitas Timor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melakukan survey awal untuk mendata para pekerja migran dan para eks di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten TTU Propinsi NTT.

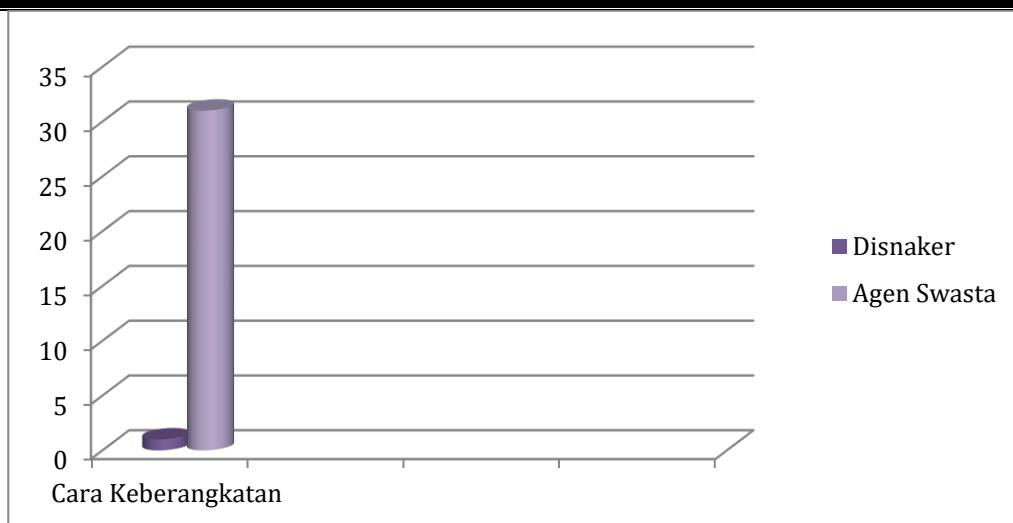


Gambar 4. Grafik 1 Jumlah Migran di Desa Pantae



Gambar 5. Gafik 2 Jumlah Migran Per Tahun

Hasil yang di temukan dari kegiatan survei tingkat migran di Desa Pantae berjumlah 52 orang yang terdiri dari 32 orang berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang berjenis kelamin perempuan. Setiap tahun jumlah migran di Desa Pantae mengalami peningkatan. di tahun 2010-2015 berjumlah 14 orang dan pada tahun 2015-2020 berjumlah 32 orang, rata-rata migran dari Desa Pantae berlatar belakang pendidikan SMP dan dan sebagai asisten rumah tangga serta belum pernah memiliki pengalaman mudik.



Gambar 6. Grafik 3 Prosedur Keberangkatan

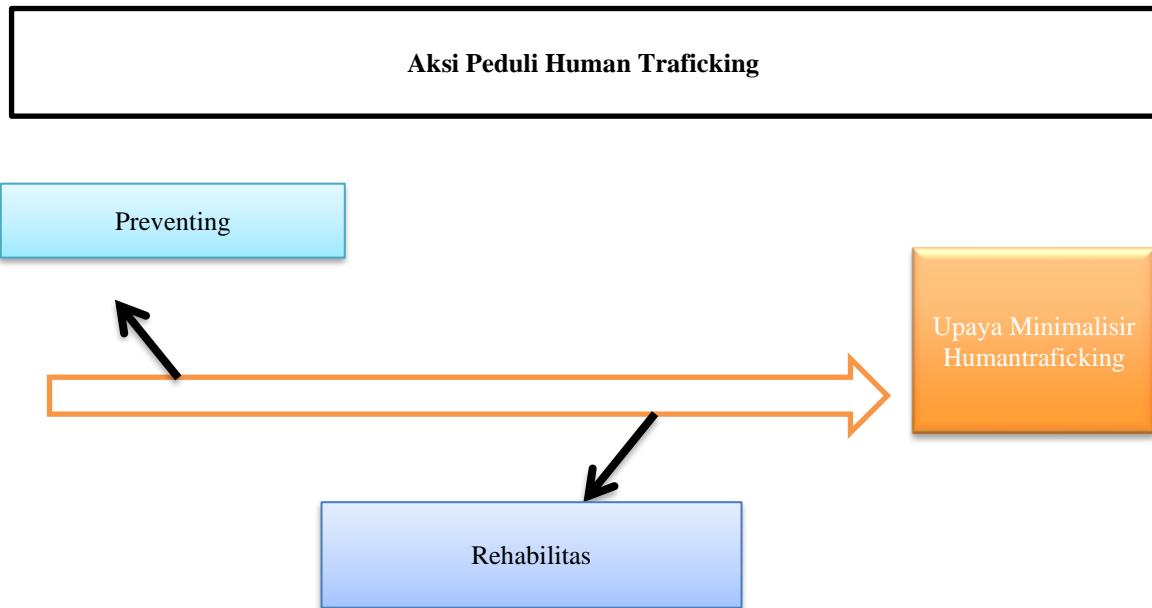
Berdasarkan data survey prosedur keberangkatan migran dari Desa Pantae sebanyak 1 orang menggunakan jalur DISNAKER dan 31 orang melewati jalur Agen Tenaga Kerja Swasta dikarenakan lebih mudah serta dengan motif persuasive dari kenalan dan keluarga. Adapun korban dalam kegiatan migrasi sebanyak 4 orang yang merasa trauma dengan perlakuan yang tidak layak selama bekerja.

II. MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam fenomena perkerja illegal yakni:

- 1) Pekerja illegal didominasi oleh masyarakat dari pedesaan dengan berlatar belakang pendidikan SMP sederajat dan oleh kaum perempuan, dengan demikian para pekerja illegal adalah masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur migrasi secara legal sehingga mereka dengan mudah terpengaruh dengan modus penipuan, serta takut terhadap tindakan ancaman serta kekerasan. Dengan demikian solusi permasalahan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, sekolah-sekolah yang ada di desa, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang migrasi illegal.
- 2) Para pekerja melakukan migrasi secara illegal karena faktor ekonomi maka perlunya pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan melihat potensi desa. Dengan demikian perlunya dilakukan musyawarah desa untuk mengklasifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan.
- 3) Perlunya membentuk wadah bagi para eks migrasi di desa sehingga dapat shearing mengenai pengalaman menjadi migran, serta perlunya perhatian khusus bagi masyarakat eks migrasi yang di justis sebagai korban yang mengalami gangguan psikolog, maupun korban fisik.

Berdasarkan data-data lapangan maka tim pengabdian merumuskan road map pengabdian dengan tujuan utama “Upaya Minimalisir *Human trafficking*” dalam rangka mencapai upaya tersebut dilakukan dua kegiatan penting yaitu kegiatan *preventif human trafficking* dan *rehabilitasi korban human trafficking*. Preventif adalah sebuah usaha pencegahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk tidak terjadinya sesuatu yang meugikan (Putra, 2015). Aksi pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan rehabilitasi berupa aksi simpati dengan melakukan kunjungan serta bantuan sosial kepada para eks migran. Rehabilitasi secara umum adalah pemulihan kondisi seseorang. Rehabilitasi dalam *human trafficking* dapat berupa rehabilitasi kesehatan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial pemulihan kondisi sosial korban yang tidak kondusif secara wajar dan baik (Hidayat, 2022), dalam hal ini aksi rehabilitasi yang dilakukan adalah memberikan perhatian khusus berupa kunjungan bantuan sosial kepada para eksmigran yang kondisinya terganggu.



Gambar 7. Road Map Pengabdian

III. METODE

Dalam pelaksanaan pengabdian metode yang digunakan adalah: perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan selama 4 bulan terhitung dari bulan juli – oktober 2023 oleh Adeodata Laniria C.B. Mbiri,S.Ip.,M.Sos, Kanisius Kono, S.Fil, M.Sos dan Adeodata Januario Barros Mbiri,S.Ip.,M.Sos Dosen Universitas Timor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Dosen Stisip Fajar Timur dengan melibatkan 2 orang mahasiswa atas nama Laurensius Naben Npm 21200146 (prodi IP Semester 7) dan Katarina Hika Klau Npm22200247 (prodi AN semester 7). Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Pantae selaku mitra pengabdian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan perencanaan diawali dengan pengantaran surat tugas ke Kecamatan Biboki Selatan, hasil dari pertemuan ini perencanaan dilakukan kegiatan pengabdian disetujui oleh pemerintah setempat.



Gambar 8. Foto Pengantaran Surat Tugas

Kegiatan selanjutnya adalah survey awal yang dilakukan pada bulan juli dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mitra serta menetapkan road map pengabdian. Hasil survey dan analisis ditemukan permasalahan yaitu rata-rata korban human trafficking berasal dari desa sehingga kegiatan di Desa Pantae Kabupaten TTU, terdapat beberapa warga Desa Pantae yang dikategorikan sebagai korban migran skala ringan yaitu mengalami trauma karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak selama bekerja, angka migran di Desa Pantae selalu mengalami peningkatan setiap tahun, rata-rata migran berpendidikan SMP dan melakukan melalui jalur agen swasta serta rata-rata para migran tidak berpengelaman dalam melakukan perjalanan jauh lintas negara. Tujuan utama para migran di Desa Pantae adalah tuntutan ekonomi untuk mencari nafkah. Hal-hal ini menjadi peluang terjadinya kasus *human trafficking* dengan demikian maka tim pengabdi merumuskan tujuan pengabdian ini adalah “minimalisir human trafficking dari desa”.



Gambar 9. Foto Kegiatan Survey awal

Dalam mencapai tujuan terdapat dua kegiatan yaitu kegiatan pereventif dan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan preventif dengan melakukan sosialisasi dengan target adalah anak-anak SMP sederajat dikarenakan rata-rata pelaku migran berlatarbelakang pendidikan SMP-SMA sederajat. Rehabilitasi dengan melakukan menunjukkan simpati dengan kegiatan kunjungan pemberian bansos kepada para korban skala ringan.

PELAKSANAAN

Pada tanggal 14 agustus tim pengabdi melakukan sosialisasi di SMP OPO Di Desa Pantae dengan focus materi sosialisasi menekan pada mekanisme/prosedur melakukan migran yang legal, dampak dan bahaya dari migrasi illegal, serta upaya penyelamatan diri yang dilakukan dalam apabila tenaga migran dalam bahaya di tempat migran.



NO.	KEGIATAN : PRAKTIK HUMAN TRAFFICKING (PERDAGANGAN MANUSIA)	KELAS	PARAF	
			1	2
1.	Astridius Rivaldi Keyo	IX	✓	✓
2.	Almanando Rivaldi Belak	IX	✓	✓
3.	Aloysius Rifandi Hanafi	IX	✓	✓
4.	Alvianus Antonius Antuan	IX	✓	✓
5.	Bernadette Sintia Ahsinah	IX	✓	✓
6.	Bilawina Huda Ahsinah	IX	✓	✓
7.	Bilawina Huda Ahsinah	IX	✓	✓
8.	Cleopatra Huda Ahsinah	IX	✓	✓
9.	Felisiana Gantella Fuman	IX	✓	✓
10.	Felisiana Gantella Fuman	IX	✓	✓
11.	Fridolinus Marbati	IX	✓	✓
12.	Gersonius Rivaldi Fezau	IX	✓	✓
13.	Herman Refandi Nailen	IX	✓	✓
14.	Jessica Kristina Palma	IX	✓	✓
15.	Kresensia Palmaia Omemo	IX	✓	✓
16.	Kristianus Palmaia Omemo	IX	✓	✓
17.	Lorraine Diprotra S. Djamilay	IX	✓	✓
18.	Maria Angelisa Aluk	IX	✓	✓
19.	Maria Rosindi Nahas	IX	✓	✓
20.	Mikhael Yordanus Mel	IX	✓	✓
21.	Sisilia Intan Dianbasu	IX	✓	✓
22.	Titi Dwi Haneno	IX	✓	✓
23.	Theresia Elfa Amkeun	IX	✓	✓
24.	Volenta Oemenas	IX	✓	✓
25.	Yuliana Usfinit	IX	✓	✓

Gambar 10. Foto Sosialisasi di SMP OPO PANTAE

Pada tanggal 16 Agustus tim pengabdi melakukan aksi rehabilitasi dengan kegiatan pertemuan bersama para eksmigran di Desa Pantae dalam pertemuan ini adapun hal-hal yang dilaksanakan yaitu kegiatan bansos serta shearing pengalaman selama bekerja sebagai buruh migran. Serta adapun rencana kedepannya yaitu akan membuat komunitas eksburuh migran Kecamatan Biboki Selatan dengan tujuan mempererat silaturahmi serta rehabilitasi sosial dengan wujudnya yaitu pemberdayaan eksburuh migran agar memperkuat perekonomian keuarga dengan demikian dapat mengurangi kegiatan migran illegal.



Gambar 11. Kegiatan Rehabilitasi

V. KESIMPULAN

Human trafficking adalah kegiatan pelanggaran HAM yang tergolong kejahatan terorganisir dan terstruktur serta menjamur karena didorong oleh kondisi ekonomi lemah, tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi sosial yang mendukung. Ladang human trafficking yang paling subur adalah masyarakat desa yang tingkat pengetahuannya rendah. Oleh karena itu solusi dari human trafficking diperlukan kolaborasi lintas sector serta perlu diatur dalam perdes sehingga menjamin prosedur perjalanan migrasi yang aman dan terjamin atau disebut dengan legal. Kekurangan dari pengabdian ini pada tatanan rehabilitasianya sebatas aksi peduli akan tetapi tidak mendalam berdasarkan kegiatan ini di temukan peluang untuk pengabdi selanjutnya agar melakukan tindakan pemberdayaan eksburuh migran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yanrut membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian “Aksi Peduli human trafficking”

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadne, E., Pratamawaty, B. B., & Limilia, and P. (2021). HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA, THE DIALECTIC OF POVERTY AND CORRUPTION. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol, 23,(3), No: 356-363. <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/30989>
- Everd Scor Rider DanielNandang Mulyana, B. W. (2017). HUMAN TRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR. *SOCIAL WORK JURNAL*, 7(1), 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808>
- Galbinst, Mikael EskelnerYuri, M. B. (n.d.). *Sejarah Perbudakan: Dari Zaman Kuno hingga Kolonialisme Spanyol di Amerika*. Cambridge Stanford Books. https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Perbudakan_Dari_Zaman_Kuno_hingg/VA0rEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Galbinst, Y. (n.d.). *Gerakan Abolisionis dan Sejarah Perbudakan di Zaman Kuno*. Cambridge Stanford Books. https://www.google.co.id/books/edition/Gerakan_Abolisionis_dan_Sejarah_Perbudak/HA0rEAAAQB AJ?hl=id&gbpv=0

HIDAYAT, N. F. I. (2022). *TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang.]. <http://repository.unissula.ac.id/25867/>

Latonero, M. (2012). Technology and Human Trafficking: The Rise of Mobile and the Diffusion of Technology-Facilitated Trafficking. In *SSRN*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2177556>

Putra, N. D. (2015). STUDI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PREVENTIF DI PUSKESMAS SEI MERDEKA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1581–1592. [https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal \(11-10-15-04-48-00\).pdf](https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/11/eJournal (11-10-15-04-48-00).pdf)

Sarkar, S. (2015). Use of technology in human trafficking networks and sexual exploitation: A cross-sectional multi-country study. *Transnasional Social Review A Social Jurnal*, 5(1), 56–68. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21931674.2014.991184>

Theddy, Ningrum Natasya, Agusmidah, R. (2021). Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021). *Legal Protection of International Labor Organization (ILO) and Indonesia Towards Indonesia Illegal Migrant Workers*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.026>

Thompson, T. C. and R. (2015). Ancient Evil, Modern Face: The Fight Against Human Trafficking. *Georgetown Journal of International Affairs*, 6(1), 43–51. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/43134072>.